

**Konflik Antara Kerajaan Gianyar Dengan Kerajaan Klungkung Tahun
1884-1894**

Dewa Made Alit

Prodi Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP PGRI Bali

dewadaton@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap latar belakang terjadinya konflik antara Kerajaan Gianyar dengan Kerajaan Klungkung, proses terjadinya konflik antara Kerajaan Gianyar dengan Kerajaan Klungkung serta dampak dari terjadinya konflik antara Kerajaan Gianyar dengan Kerajaan Klungkung. Empat Kerajaan yaitu Klungkung, Bangli, Mengwi dan Badung menyerang Kerajaan Gianyar dari segala penjuru. Hubungan Kerajaan Gianyar dengan kerajaan tetangga dipererat, berkat kemampuan diplomasi patihnya terciptalah perjanjian (Pasobaya) antara 3 kerajaan yaitu Gianyar, Badung dan Tabanan. Pemulihan kedaulatan Kerajaan Gianyar berawal dari gerakan para punggawa yang berdaulat, Tegalalang dan Peliatan. Satu persatu daerah Kerajaan Gianyar yang diduduki oleh Dewa Agung di Klungkung dapat direbut kembali oleh laskar gabungan Gianyar yang menghendaki kebangkitan dan pulihnya kedaulatan Kerajaan Gianyar. Dampak dari konflik antara Kerajaan Gianyar dengan Kerajaan Klungkung yaitu kembalinya Dewa Ngurah Pahang ke Gianyar dari tempat pengasingannya di Puri Kawan Klungkung merupakan titik balik dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Bali selatan dan menempatkan Dewa Agung di Klungkung dalam posisi yang sangat terdesak. Berkat duet kepemimpinan itu pula Raja-Raja Badung, Tabanan, Bangli dan Karangasem mengakui realitas kedaulatan Kerajaan Gianyar dan Pemerintah Hindia Belanda di Batavia ikut mengakui dan memperkuat eksistensi Kerajaan Gianyar.

Kata Kunci : Konflik, Kerajaan Gianyar, Kerajaan Klungkung

Latar Belakang

Takluknya Bali terhadap Majapahit mendorong didirikannya sebuah dinasti di Samprangan dan memiliki raja pertama bernama Sri Aji Kresna Kepakisan dan raja terakhir yang disebut dengan periode Gelgel adalah Dalem Di Made. Setelah itu berdirilah kerajaan Klungkung yang sebenarnya masih tetap bagian dari Dinasti Gelgel dan berdirinya kerajaan-kerajaan lain di Bali, yaitu Kerajaan Buleleng, Mengwi, Karangasem, Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli dan Payangan.

Pada Abad ke-18 ditinjau dari struktur politik dan kenegaraan, Kerajaan Klungkung lebih mendekati struktur federasi. Kemudian pada abad ke-19 lebih mendekati struktur konfederasi. Kerajaan-kerajaan di Bali yaitu Buleleng, Mengwi, Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli, dan Payangan tetap mengakui raja tertinggi di Klungkung (*sesuhunan*) dan raja-raja Bali mengakui raja tertinggi Dewa Agung di Klungkung sebagai kepala rohani yaitu sebagai keturunan raja-raja Majapahit. Sebaliknya, dari sudut pertahanan keamanan militer, laskar Klungkung lebih lemah dari kerajaan-kerajaan lainnya di Bali. Kelemahan pertahanan keamanan didalam kerajaan Klungkung telah mendorong hasrat para bangsawan Bali turut berlomba-lomba membangun kekuasaan. Pada saat itu Kerajaan Klungkung yang di anggap sebagai *Sesuhunan* raja-raja di Bali tidak juga bisa terhindar dari konflik dengan kerajaan yang berada di

bawah kekuasaannya seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Gianyar.

Setelah keruntuhan kerajaan Payangan perasaan khawatir dan ragu-ragu akan kesetiaan terhadap kerjasama kerajaan Gianyar dan kerajaan Klungkung yang dipupuk sejak lama. Upaya demi upaya telah dilakukan oleh Dewa Agung di Klungkung untuk menekan kebesaran kerajaan Gianyar. Masalah tapal batas, konspirasi, perkawinan, pusaka kerajaan dan intrik senantiasa muncul serta ditujukan kepada pemegang tahta di kerajaan Gianyar.

Metode Penelitian

1. Heuristik

Tahap awal yang harus ditempuh adalah mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya mengenai Kerajaan Gianyar. Pengumpulan sumber-sumber ini dikenal dengan istilah heuristik. Daliman (2012 : 51) berpendapat bahwa “Heuristik adalah langkah kerja peneliti untuk memngumpulkan sumber-sumber (*sources*) atau bukti-bukti (*evidence*) sejarah”.

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data antar lain metode pustaka. Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan cara mendalami, mencermati, menalaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan yaitu sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain.

2. Kritik Sejarah

Setelah memperoleh sumber, tentu saja sumber-sumber itu tidak begitu saja langsung dapat digunakan namun harus dikritik terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menyaring sumber mana yang layak untuk digunakan dan mana yang tidak. Seperti yang disampaikan pada (*Social Science Uducation Consortium, 1966 : 279-280*) yang dikutip oleh Daliman (2012 : 65) menyebutkan bahwa:

Sumber-sumber sejarah masih perlu dikritik atau di verifikasi, sebab sifat-sifat sumber data-data sejarah berbeda dengan sumber data-data ilmu sosial lainnya. Sama halnya dengan penelitian sejarah yang tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung seperti halnya ilmu-ilmu sosial lainnya.

3. Interpretasi

Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah. Maka fakta-fakta sebagai bukti-bukti apa yang pernah terjadi di masa lampau diinterpretasi dengan mencari dan membuktikan relasinya yang satu dengan lainnya, sehingga membentuk satu rangkaian makna faktual dan logis dari kehidupan

masa lampau suatu kelompok, masyarakat ataupun suatu bangsa. Relasi tersebut dapat berbentuk relasi subjek (siapa?), tempat (dimana?), waktu (kapan?), fungsional (apa?), keadaan atau proses (bagaimana?), sebab-akibat (mengapa?) dan lainnya.

Menurut Kunto Wijoyo “Interpretasi sejarah sering juga disebut dengan analisis sejarah, dalam hal ini ada dua metode yang digunakan yaitu, analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan dan sintesis berarti menyatukan sehingga keduanya dipandang sebagai metode utama dalam interpretasi” (Dudung, 2007 : 73).

4. Historiografi

Dari sudut etimologis, historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia dan grafien. Historia berarti penyelidikan tentang gejala alam fisik, sedangkan grafien berarti gambaran, lukisan, tulisan atau uraian. Dengan demikian, secara harfiah historiografi dapat diartikan sebagai uraian atau tulisan tentang hasil penelitian mengenai gejala alam. Dalam perkembangannya, historiografi juga mengalami perubahan karena para sejarawan mengacu pada pengertian historia, sebagai usaha mengenai penelitian ilmiah yang cenderung menjurus pada tindakan manusia masa lampau. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa historiografi merupakan

tingkatan kemampuan seni yang menekankan pentingnya keterampilan, tradisi akademis, ingatan subjektif dan pandangan arah yang semuanya memberikan warna pada hasil penulisannya. Dengan demikian, Historiografi merupakan hasil karya sejarawan yang menulis tulisan sejarah (Sulasman, 2014 : 147-148).

HASIL PENELITIAN

1. Latar Belakang Konflik Kerajaan Gianyar Dengan Kerajaan Klungkung

Ditinjau dari “sudut politik dan kenegaraan kekuasaan kerajaan Klungkung lebih mendekati struktur federasi selama abad ke-18. Kemudian pada abad ke-19 lebih mendekati struktur konfederasi. Delapan raja lainnya yaitu Buleleng, Mengwi, Badung, Tabanan, Gianyar, Bangli, dan Payangan tetap mengakui raja tertinggi di Klungkung (*sesuhunan*). Serta mengakui raja tertinggi Dewa Agung di Klungkung sebagai kepala rohani karena dianggap keturunan raja-raja Majapahit. Sebaliknya dari sudut pertahanan keamanan militer, laskar Klungkung lebih lemah dari pada kerajaan-kerajaan lainnya di Bali. Kelemahan pertahanan keamanan didalam kerajaan Klungkung telah mendorong hasrat para bangsawan Bali turut berlomba-lomba membangun kekuasaan dan mendirikan kerajaan-kerajaan. Pada

pertengahan abad ke-18 berdiri kerajaan ditepi utara yang kemudian menjadi wilayah Kerajaan Gianyar” (Utrecht, 1962 : 97-98).

Dari sudut pandang tersebut mendorong terjadinya konflik yang antara Kerajaan Gianyar dengan Kerajaan Klungkung dan konflik tersebut juga di latar belakang dari beberapa faktor-faktor yaitu seperti dari faktor politik, ekonomi, sosial dan sistem pemerintahan Dewa Manggis VII.

a. Faktor Politik

“Pada tanggal 25 April 1837 ditandatangani perjanjian (*pasobaya*), Pasobaya 1837 melibakan delapan Kerajaan (*Pasobaya Asta Negara*) yang mengakui Dewa Agung di Klungkung sebagai sesuhunan raja-raja Bali dan Lombok. Kedelapan raja yang menandatangani perjanjian tahun 1837 adalah Klungkung, Gianyar, Bangli, Karangasem, Payangan, Buleleng, Mengwi dan Badung. Selain itu pada pada tahun 1837 ditandatangani perjanjian perdamaian tiga kerajaan yaitu Klungkung, Gianyar dan Bangli bersama-sama akan melindungi Kerajaan Payangan” (Nindhia, 1976 : 41).

Langkah-langkah yang diambil Dewa Agung Raja Klungkung selama berkuasa benar-benar mampu mempersatukan raja-raja di Bali yang menghindarkan

konflik-konflik antar kerajaan. Upaya-upaya damai untuk tujuan kemakmuran bersama senantiasa menjadi kebijakan bagi pemerintahannya.

Namun setelah “Dewa Agung istri Kanya kemudian mengundurkan diri pada tahun 1840, muncul kesukaran dan ketidak stabilan kehidupan dimasing-masing kerajaan peserta *Pasobaya* Setelah Dewa Agung Istri Kanya mengundurkan diri dan tahta kerajaan dipegang oleh adiknya yang bernama Cokorda Ketut Rai, setelah di nobatkan (*abiseka*) bergelar Dewa Agung Putra II (1840-1850) perpecahan diantara kerajaan-kerajaan dan internal kerajaan mulai merebak” (Sirikan 1956 : 48).

b. Faktor Ekonomi

Dewa Agung Putra raja Klungkung sesungguhnya hanya berkuasa disebuah Kerajaan yang wilayahnya sangat kecil yaitu “ Kerajaan Klungkung dengan jumlah penduduk yang kecil pula (50.000 jiwa). Sebaliknya Kerajaan Gianyar menguasai wilayah yang luas, potensi ekonominya kuat dan potensi penduduk yang jauh lebih besar dari Klungkung jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kerajaan Gianyar (100.000 jiwa lebih). Melihat kondisi itu dapat dimengerti bahwa Dewa Agung Putra di Klungkung sangat cemburu terhadap keadaan Kerajaan Gianyar. Setelah

Dewa Agung Putra berkuasa, maka muncul hasratnya untuk menghegemoni Kerajaan Gianyar dari segi ekonomi.

Kerajaan Klungkung yang dianggap Sesuhunan Raja Bali dan Lombok “menginginkan upeti-upeti dan pajak yang harus diberikan kepada Kerajaan Klungkung itu dikarenakan wilayah Kerajaan Klungkung yang sangat sempit. Namun Kerajaan Gianyar yang dipimpin Dewa Manggis VII tidak terima dengan peraturan tersebut, peraturan itu ditentang Dewa Manggis VII agar rakyat Kerajaan Gianyar tidak menderita karena pembayaran pajak yang diinginkan oleh Kerajaan Klungkung” (Sidemen, 1983 : 48).

c. Faktor Sosial

Kegagalan perkawinan Dewa Agung di Klungkung dengan Dewa Ayu Muter putri Raja Gianyar mengakibatkan memburuk dan putusnya hubungan kedua Kerajaan tersebut. Sistem perkawinan yang dipakai sebagai landasan oleh Dewa Agung Putra III untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan di Bali ternyata gagal. Kerajaan Gianyar mulai melepaskan diri.

Dari faktor sosial tersebut Dewa Agung ingin menghegemoni Kerajaan Gianyar dengan cara perkawinan maupun sebagai pemimpin spritual. Akan tetapi Dewa Manggis menentang cara-cara yang

dilakukan oleh Dewa Agung sehingga terjadinya konflik antara Kerajaan Gianyar dengan Kerajaan Klungkung.

d. Sistem Pemerintahan Dewa Manggis VII

Dewa Manggis Disatria atau Dewa Manggis VII menjadi raja Gianyar menggantikan ayahandanya Raja I Dewa Manggis Dirangki atau Dewa Manggis VI. “Kebijaksanaan Dewa Manggis Disatria tiada kurang dari ayahandanya dengan Patih I Made Pasek Tjedok mengendalikan pemerintahan Kerajaan Gianyar. I Dewa Manggis Disatria atau Dewa Manggis VII melanjutkan pemerintahan ayahandanya yang tidak bersedia untuk mengakui kekuasaan Dewa Agung di Klungkung. Didampingi dua bersaudara yaitu I Made Pasek sebagai Patih Agung dan I Ketut Pasek yang menjabat sebagai Jaksa Agung kerajaan” (Sirikan, 1956 : 126).

2. Proses Terjadinya Konflik Antara Kerajaan Gianyar Dengan Kerajaan Klungkung

Rencana Raja Klungkung dan Bangli mulai dilaksanakan. Empat Kerajaan yaitu Klungkung, Bangli, Mengwi dan Badung menyerang Kerajaan Gianyar dari segala penjuru. “Dari sebelah timur diserang oleh tentara Klungkung, dari timur laut Kerajaan Bangli, dari barat laut oleh Kerajaan Mengwi dan

dari barat tentara Kerajaan Badung. Patih Made Pasek tidak kehilangan akal rencana itu terlebih dahulu telah diketahuinya dan telah mengadakan persiapan-persiapan” (Mahaudiana, 1968 : 56). Beruntung Kerajaan Gianyar memiliki Patih yang cakap, sehingga sebelum diserang dari berbagai arah Patih Kerajaan Gianyar sudah memiliki persiapan-persiapan yang cukup matang.

“Pada tahun 1859 perkawinan Dewa Agung Putra III di keraton Semarapura Klungkung itu menghawatirkan Dewa Manggis VII di keraton Gianyar dan menambah kuat perpecahan antara kerajaan Klungkung dan Gianyar. Raja Klungkung dan raja Gianyar sama-sama menutup rapat-rapat daerah perbatasan kerajaan mereka. Pemisahan diri kerajaan Gianyar dengan kerajaan Klungkung juga terjadi” (Sirikan, 1956 : 105). Keberanian raja Gianyar menentang Dewa Agung Putra III di Klungkung karena kemampuan dan peranan patih kerajaan yaitu Made Pasek dan Ketut Pasek untuk mempersatukan potensi rakyatnya di Gianyar.

Hubungan dengan kerajaan tetangga dipererat, berkat kemampuan diplomasinya terciptalah perjanjian (*Pasobaya*) antara 3 kerajaan yaitu Gianyar, Badung dan Tabanan tentang pencegahan pelanggaran adat susila perkawinan yang mengakibatkan permusuhan antara ketiga kerajaan tersebut.

Pasobaya antara tiga kerajaan yaitu Gianyar, Badung dan Tabanan ditanda tangani oleh rajanya masing-masing yaitu I Dewa Manggis VII, I Gusti Ngurah Pemecutan dan I Gusti Ngurah Tabanan.

Pasobaya tiga kerajaan yang disetujui bertujuan agar terhindar dari konflik antara kerajaan karena kegagalan perkawinan seperti yang pernah menimpa kerajaan Gianyar dengan kerajaan Klungkung. Kegagalan perkawinan Dewa Agung Putra III di Klungkung dengan Dewa Ayu Muter putri raja Gianyar mengakibatkan memburuk dan putusnya hubungan antara kedua kerajaan tersebut

Kerajaan Gianyar yang diperintah oleh Dewa Manggis VII ingin mempertahankan kedaulatannya dan tidak mengakui kekuasaan Dewa Agung di Klungkung. Sikap Raja Gianyar mempertahankan kedaulatan kerajaannya ternyata menambah kejengkelan dan rasa permusuhan antara Kerajaan Gianyar dan Kerajaan Klungkung” (Agung, 1989 : 400). *Pasobaya* tersebut adalah usaha-usaha Kerajaan Gianyar tersebut dilakukan untuk memperkuat kerajaannya dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Dewa Agung di Klungkung.

I Dewa Manggis VII yang sudah lanjut usia suatu ketika jatuh cinta pada seorang wanita muda,

penari dari Desa Sukawati yang kemudian dinikahi dan diberi nama Jero Nyeri. Jero Nyeri sangat disayang oleh raja berhasil mempengaruhi raja. “Atas desakannya, I Dewa Manggis VII mengangkat saudara Jero Nyeri yang bernama Ketut Sara sebagai Patih Agung dan memberhentikan Made Pasek dari jabatannya. Pengangkatan Ketut Sara menjadi Patih Agung ternyata membangkitkan rasa tidak puas di kalangan pemuka-pemuka rakyat di Kerajaan Gianyar” (Agung, 1989 : 403). Ketut Sara mulai menerapkan politik membuka diri terhadap Kerajaan Klungkung. Kebijakan ini ditempuh karena “Ketut Sara dipengaruhi oleh Dewa Agung di Klungkung yang memberitahu kemungkinan-kemungkinan Kerajaan Gianyar akan diserang dari tiga arah oleh Kerajaan Klungkung, Bangli dan Badung, Menurut Ketut Sara, kebijakan membuka hubungan dengan Kerajaan Klungkung secara damai akan lebih menguntungkan karena kedudukan kerajaan akan terjamin” (Sirikan : 1956 : 138). Perlindungan Kerajaan Klungkung sangat diharapkan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya konflik di dalam negeri Kerajaan Gianyar.

Sejak Ketut Sara sebagai Patih Agung memegang pimpinan pemerintahan di Kerajaan Gianyar, terus menerus timbul kesulitan dalam negeri kerajaan. Tindakan penggabungan kerajaan dibawah

perlindungan Dewa Agung di Klungkung tidak sesuai dengan keinginan Dewa Manggis VII

“Pada awal tahun 1885 muncul pemberontakan muncul pemberontakan rakyat di Desa Negara, dibawah pimpinan punggawa mereka yang bernama Cokorda Gde Oka. Motif pemberontakan dapat dilacak rasa tidak puas terhadap sikap raja dan patih Kerajaan Gianyar yang sangat lemah. Selain itu karena hasutan Dewa Agung di Klungkung yang tidak menghendaki Kerajaan Gianyar menjadi kuat” (Sirikan, 1956 : 142). Punggawa Negara keduanya penguasa daerah di Kerajaan Gianyar, dipengaruhi oleh hasutan Dewa Agung untuk memberontak kepada Dewa Manggis VII. Punggawa Negara menyatakan daerah kekuasaannya terlepas dari Kerajaan Gianyar dan menempatkan dirinya dibawah kekuasaan Dewa Agung di Klungkung. Dampak yang ditimbulkan oleh pemberontakan tersebut membuat Kerajaan Gianyar dalam kondisi yang sangat pelik dan beberapa desa di Gianyar juga ikut melepaskan diri dari Kerajaan Gianyar.

Dalam Keadaan yang serba kritis dan terjepit, Dewa Manggis VII memutuskan meninggalkan Keraton Gianyar bersama keluarganya menuju Banjarangkan, daerah kekuasaan punggawa I Dewa Made Raka, kakak Raja Gianyar.

“Punggawa Banjarangkan menyarankan agar jangan melanjutkan perjalanannya ke Klungkung sebab punggawa Banjarangkan tetap menentang sikap Dewa Agung di Klungkung. Namun Raja Gianyar tetap pada pendiriannya tidak terpengaruh saran yang diberikan dan yakin bahwa Dewa Agung akan menjamin keselamatannya” (Mahaudiana, 1968 : 77). Bukannya perlindungan yang diberikan Dewa Agung di Klungkung kepada Dewa Manggis VII akan tetapi malah dijebloskan ke dalam penjara, itu dilakukan agar Dewa Agung di Klungkung lebih mudah menguasai wilayah Kerajaan Gianyar.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Gianyar, Dewa Agung minta bantuan Raja Bangli Dewa Made Tangkeban untuk mengirimkan laskarnya ke Gianyar. Laskar Bangli dalam jumlah besar memasuki wilayah Kerajaan Gianyar dan menduduki desa-desa disebelah timur. Desa-desa disebelah timur sungai Petanu diduduki dan menjadi dibawah kekuasaan Kerajaan Klungkung. “Hanya daerah Gianyar disebelah barat yang masih menyatakan diri mereka tidak suka ditaklukan oleh Kerajaan Klungkung ialah kepunggawaan Tegalalang, Peliatan, Payangan dan Tampaksiring. Punggawa-punggawanya bersatu menghadapi musuh yang berani memasuki salah

satu wilayahnya” (Mahaudiana, 1968 : 78).

Pada tanggal 30 Agustus 1890 laskar gabungan desa-desa antara lain Ketewel, Batuyang, Batubulan, Singapadu, Sukawati, Celuk, Batuan, Lodtunduh dan Silakarang dibawah pimpinan Cokorda Oka menyerang Ubud yang berada di bawah Kepunggawaan Kerajaan Gianyar. Sementara itu dipihak laskar gabungan Ubud, Peliatan dan Tegalalang menyatukan kekuatan menghadapi laskar gabungan dari Negara. Penyerangan terhadap Ubud dimulai dari desa Katiklantang dan Jukut Paku dibawah pimpinan Dewa Ketut Sandat patih Negara. Penyerangan terhadap Peliatan dimulai dari desa Sakah dibawah pimpinan Cokorda Oka sendiri” (Mahaudiana, 1968 : 84).

Satu persatu daerah-daerah Kerajaan Gianyar yang pernah diduduki oleh kuasa-kuasa daerah Dewa Agung di Klungkung dapat direbut kembali oleh laskar gabungan Gianyar yang menghendaki kebangkitan dan pulihnya kedaulatan Kerajaan Gianyar. Proses perebutan daerah-daerah disatu pihak dan dilain pihak pengembalian kedua Putra Mahkota Kerajaan Gianyar dari pengasingan adalah aktivitas dari punggawa dan rakyat yang masih setia yang berlangsung kurang lebih tiga tahun (1890-1893). Selama kurun waktu itu

kemunculan dua tokoh yakni I Dewa Made Rai Sana Punggawa Tegalalang dan Cokorda Gde Sukawati sangat memberi arti bagi pemulihan kedaulatan Kerajaan Gianyar.

3. Dampak Dari Konflik Antara Kerajaan Gianyar Dengan Klungkung

Setelah terjadinya konflik antara Kerajaan Gianyar dengan Kerajaan Klungkung, terjadilah dampak yang signifikan terhadap Kerajaan Klungkung dan Kerajaan Gianyar.

a. Bersatunya Para Punggawa Dalam Pemulihan Kedaulatan Kerajaan Gianyar

Hubungan kekuatan politik dan pergeseran geopolitik di Gianyar terjadi secara signifikan selama kurun tahun 1890-1894. Dewa Agung di Klungkung kehilangan satu-persatu daerah kekuasaannya di Gianyar yaitu desa-desa di Negara, Blahbatuh dan Gianyar. Pada masa Cokorsa Rai Batur berkuasa, Ubud berkembang dari desa yang benar-benar tidak berarti menjadi sebuah daerah yang pantas diperhitungkan”(Sirikan, 1956 : 157). Cokorda Gde Sukawati mengikuti dan sebagai penerus jejak ayahnya dan bersama-sama dengan sanak saudara dan kerabat dari wilayah Gianyar, terutama arahan dari punggawa Tegalalang I Dewa Made Rai Sana, dia berhasil

menguasai hampir seluruh wilayah tepi barat laut Gianyar.

Kembalinya Dewa Ngurah Pahang ke Gianyar dari tempat pengasingannya di Puri Kawan Klungkung merupakan titik balik dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Bali selatan dan menempatkan Dewa Agung di Klungkung dalam posisi yang sangat pelik.

Sementara itu, setibanya Dewa Ngurah Pahang di Gianyar menugaskan Cokorda Gde Sukawati untuk mengambil langkah kongkrit yakni menaklukkan dan merebut kembali desa-desa yang dahulu diduduki Klungkung dan Bangli. Lantaran masih cukup muda usianya dan dalam rangka melaksanakan tugas berat tersebut, Cokorda Gde Sukawati ditetapkan menjadi punggawa Ubud sekaligus Senapati Kerajaan Gianyar dan para punggawa, pemuka rakyat menerimanya dengan baik. Kerajaan Gianyar Diakui Kedaulataannya dan Kerajaan Klungkung Dalam Posisi Yang Terdesak.

Memperhatikan perkembangan situasi politik di Gianyar dan menimbang bahwa Kerajaan Gianyar memiliki Geopolitik Strategi di Bali karena potensi penduduk dan alamnya yang mempunyai batas laut yang lebar, maka “Residen Danmenbergh tidaklah bijaksana jika Kerajaan Gianyar akan terjerumus terus-menerus dalam konflik dan

disintegrasi. Sebaliknya “diperlukan situasi kondusif, terpelihara keamanan dan ketertiban serta kekuatan-kekuatan yang mampu mengintegrasikan, raja dan rakyatnya agar tercipta pemerintahan yang kuat, menurut Residen Danmenbergh pada hakekatnya kekacauan dan disintegrasi yang terjadi di Gianyar disebabkan oleh penggabungan Kerajaan Gianyar dibawah Dewa Agung di Klungkung” (Agung, 1989 : 434)”. Dewa Agung di Klungkung tidak pernah berhasil melaksanakan pemerintahan secara normal di Gianyar dan rakyatnya menderita. Sekarang ternyata Dewa Ngurah Agung berhasil memulihkan kembali keamanan, ketertiban dan kekuasaannya dapat diterima oleh para punggawa, manca pemuka rakyat dan rakyat seluruhnya.

Berdasarkan realitas tersebut “Residen Danmenbergh mengusulkan kepada pemerintahannya di Batavia untuk menyetujui permintaan Dewa Ngurah Agung diakui sebagai kerajaan yang berdaulat dan diperbolehkan membuat kontrak dengan pemerintah Gubernemen. Disertai bahwa Dewa Ngurah Agung benar-benar dapat mempertahankan kekuasaan dan kedudukannya atas dukungan rakyat dan pemuka-pemukanya serta semua punggawa yang berkuasa di Gianyar” (Agung, 1989 : 435).

Berkat duet kepemimpinan itu pula “Raja-Raja Badung, Tabanan, Bangli dan Karangasem mengakui realitas kedaulatan Kerajaan Gianyar dan bahkan Pemerintah Hindia Belanda di Batavia ikut mengakui dan memperkuat eksistensi Kerajaan Gianyar dengan beslit Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia, H.J. A Van Der Wijck, no. 32 pada tanggal 19 Maret 1894” (Sirikan, 1956 : 191). Duet kepemimpinan antara Dewa Pahang Raja Gianyar dan Cokorda Gde Sukawati punggawa Ubud sekaligus sebagai panglima perang laskar Kerajaan Gianyar telah mampu merebut, mengembalikan dan memulihkan kedaulatan Kerajaan Gianyar dari puing keruntuhan. Sekarang berkat duet kepemimpinan itu, Kerajaan Gianyar telah berdaulat dan berdiri sendiri sejajar kedudukannya dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Bali.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Konflik Kerajaan Gianyar Dengan Kerajaan Klungkung Tahun 1884-1894 yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Faktor politik*, kehancuran Kerajaan Payangan ini telah membangkitkan perasaan ragu dan kekhawatiran raja-raja yang sudah menandatangani dan

menjadi peserta *Pasabaya Asta Negara*. Setelah keruntuhan Kerajaan Payangan perasaan khawatir dan ragu-ragu akan kesetiaan terhadap kerjasama kerajaan Gianyar dan kerajaan Klungkung yang dipupuk sejak lama.

2. *Faktor ekonomi*, Kerajaan Klungkung yang dianggap Sesuhunan Raja Bali dan Lombok menginginkan upeti-upeti dan pajak yang harus diberikan kepada Kerajaan Klungkung itu dikarenakan wilayah Kerajaan Klungkung yang sangat sempit. Namun Kerajaan Gianyar yang dipimpin Dewa Manggis VII tidak terima dengan peraturan tersebut.
3. *Faktor sosial*, kegagalan perkawinan Dewa Agung di Klungkung dengan Dewa Ayu Muter putri Raja Gianyar mengakibatkan memburuk dan putusnya hubungan kedua Kerajaan tersebut.
4. *Sistem Pemerintahan Dewa Manggis VII*, I Dewa Manggis Disatria atau Dewa Manggis VII melanjutkan pemerintahan ayahandanya yang tidak bersedia untuk mengakui kekuasaan Dewa Agung di Klungkung.

2. Proses terjadinya konflik antara Kerajaan Gianyar dengan Kerajaan Klungkung yaitu Rencana Raja Klungkung mulai dilaksanakan. Empat Kerajaan yaitu Klungkung, Bangli, Mengwi dan Badung menyerang Kerajaan Gianyar dari segala penjuru. Hubungan Kerajaan Gianyar dengan kerajaan tetangga dipererat, berkat kemampuan diplomasi patihnya terciptalah perjanjian (*Pasobaya*) antara 3 kerajaan yaitu Gianyar, Badung dan Tabanan. Pemulihan kedaulatan Kerajaan Gianyar berawal dari gerakan para punggawa yang berdaulat, Tegalalang dan Peliatan. Satu persatu daerah-daerah Kerajaan Gianyar yang pernah diduduki oleh kuasa-kuasa daerah Dewa Agung di Klungkung dapat direbut kembali oleh laskar gabungan Gianyar yang menghendaki kebangkitan dan pulihnya kedaulatan Kerajaan Gianyar.

3. Dampak dari konflik antara Kerajaan Gianyar dengan Kerajaan Klungkung yaitu Kembalinya Dewa Ngurah Pahang ke Gianyar dari tempat pengasingannya di Puri Kawan Klungkung merupakan titik balik dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Bali selatan dan menempatkan Dewa Agung di Klungkung dalam posisi yang sangat terdesak. Berkat duet kepemimpinan itu pula Raja-Raja Badung, Tabanan, Bangli dan Karangasem mengakui realitas kedaulatan Kerajaan Gianyar dan bahkan Pemerintah Hindia

Belanda di Batavia ikut mengakui dan memperkuat eksistensi Kerajaan Gianyar.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Ide Anak Agung Gde. 1989. *Bali Pada Abad XIX*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Alfian, Alfian. 2012. *Kekuatan Pemimpin. Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin Politik?*. Jakarta Selatan: Kubah Ilmu.

ANRI, 1964. *Surat-surat Perdjudjian antara Keradjaan-Keradjaan Bali/Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda 1841 s/d 1938*. Djakarta.

Arif, Muhamad. 2011. *Pengantar Kajian Sejarah. Bandung* : Yrama Widya.

Berg, C.C., 1932. *Babad BlaBatuh*. Santpoort : C.A. Mees.

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Daliman. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.

Dudung. 2007. *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : AR Ruzz Media.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala*

- Permasalahan Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kartodirjdo, Sartono. 1992. *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Mahaudiana. 1968. *Babad Manggis Gianyar*. Gianyar : A.A. Gde Taman.
- Moertono, S. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Narwoko, J.Dwi dan Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Nasikun,. 2003. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nordholt, Henk Schulte. 2006. *The Spell of Power : Sejarah Politik Bali 1650-1940*. Denpasar. Pustaka Larasan.
- Oka Nindhia, Tjok. 1976. *Babad Dalem Pemayun Payangan : Silsilah Raja-raja di Puri Agung Payangan*. Puri Taman Payangan.
- Pageh, I Made. 2010. *Metodologi Sejarah Dalam Perspektif Pendidikan*. Denpasar: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha dan Pustaka Larasan.
- Rai Mirsha, I Gusti Ngurah. 1986. *Sejarah Bali*. Penyusunan Sejarah Bali Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
- Ratna, Nyoman. 2005. *Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi dan fakta*. Denpasar : Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George, dkk, 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Robert, H. Lauer. 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sidemen, I.B. 1980. *Geguritan Rereg Gianyar : Alih Aksara dan Alih Bahasa*. Jakarta : Debdikbud.
- Sidemen, I.B. 1983. *Sejarah Klungkung : Dari Smarapura Sampai Puputan*. Klungkung. : Pemerintah daerah Tingkat II Klungkung.
- Sirikan, Gora, 1956. *Sejarah Bali*. Bandung : NV Masa Baru.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suhartono, Pranoto. 2006. *Teori Dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sukeni, Ni Nyoman. 2009. *Hegemoni Negara dan Resistensi Perempuan*. Denpasar : Udayana University Press.

Sulasman. 2014. *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Bandung : CV. Pustaka Setia.

Sutaba, I Made, dkk, 2007. *Sejarah Gianyar Dari Jaman*

Prasejarah Sampai Masa Baru - Modern. Gianyar : Pemerintah Kabupaten Gianyar Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Utrecht, E. 1962. *Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*. Bandung : Sumur Bandung.

